

BAB II

DINAMIKA DAN LATAR BELAKANG KRISIS DEMOGRAFI DI KOREA SELATAN

Bagian ini membahas tentang krisis demografi yang terjadi di Korea Selatan dimulai dari dinamika krisis demografi di Korea Selatan sejak tahun 1960 yang terjadi karena transformasi besar di Korea Selatan serta sebab dan akibat krisis demografi dalam mempengaruhi Korea Selatan dalam bidang ekonomi hingga bidang militer.

A. Dinamika Krisis Demografi di Korea Selatan

Masyarakat Korea telah mengalami transformasi besar sejak tahun 1960. Keajaiban ekonomi, transisi demografis, urbanisasi, perubahan dalam kehidupan keluarga, dan pembentukan masyarakat sipil merupakan fitur utama dari transformasi. Runtuhnya rezim Syngman Rhee disebabkan oleh kekuatan mahasiswa pada tahun 1960 dan institusi rezim militer yang dipimpin oleh Park Jung-hee satu tahun kemudian menandakan awal dari seluruh proses transformasi. Pemerintah militer memprakarsai dorongan kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan kontrol populasi pada tahun 1962, dan upayanya akhirnya tercapai. (Hwan, 2019)

Sebelum ekonomi Korea bangkit dari stagnasi tradisionalnya, Korea adalah salah satu

negara termiskin di dunia, dengan sedikit sumber daya alam dan tekanan populasi yang berkembang pesat. Pada tahun 1960, GNP per kapita adalah sekitar 80 dolar AS, dan 25 juta orang tinggal di tanah seluas sekitar 100.000 kilometer persegi (62.000 mil persegi). Selain itu, negara Korea telah dibagi menjadi dua entitas politik setelah pembebasannya pada tahun 1945 dari pemerintahan kolonial Jepang selama 35 tahun, dan perang saudara selama 1950-53 (Perang Korea) menegaskan kembali pembagian wilayah negara tersebut. (Kwon T. H., 1975)

Secara tradisional, mayoritas penduduk Korea berfokus pada agrikultur. Namun, eksploitasi kebijakan agrikultur oleh rezim penjajah menyebabkan ledakan eksodus para penyewa miskin dan buruh tani ke Jepang, Manchuria, dan kota-kota di semenanjung Korea selama periode kolonial. Populasi perkotaan meningkat dari 2,8% dari total populasi pada tahun 1915 menjadi 13,2% pada tahun 1944. Diperkirakan ada sekitar empat juta orang Korea di luar negeri — mewakili 13% dari seluruh penduduk Korea di seluruh dunia pada akhir masa pemerintahan kolonial. Singkatnya, Korea mengalami diaspora terbesar di negara mana pun pada paruh pertama abad kedua puluh. (Stephen, *South Korea's Demographic Dividend: Echoes of the Past or Prologue to the Future?* (CSIS Reports), 2019)

Setelah perang 1950-53, emigran Korea di Jepang dan Manchuria dipulangkan dalam skala besar, dan sekitar 80% dari mereka menetap di Korea Selatan. Selain itu, gerakan populasi berkembang dari Korea Utara ke Korea Selatan segera setelah pembebasan dan berlanjut melalui perang saudara. Jumlah total pengungsi yang kembali dan yang memasuki Korea Selatan diperkirakan lebih dari 3 juta, sekitar 15% dari total populasi Korea Selatan. Para migran miskin menuju ke kota, dan wilayah perkotaan mengalami ledakan populasi. Hasil lain dari perang adalah ledakan bayi yang menghasilkan tingkat pertumbuhan populasi alami tahunan sebesar 3%, yang tertinggi dalam sejarah Korea. Ledakan bayi menambah kesulitan ekonomi di Korea semakin parah. Pada saat krisis ini, negara ini memulai perjalanannya menuju pembangunan dan modernisasi. (Hwan, 2019)

1. Transisi Demografi (*Demographic Transition*)

Transisi demografis Korea dimulai pada awal abad ke-20 dengan diperkenalkannya sistem medis dan kesehatan Barat. Angka kematian menurun, dan harapan hidup orang Korea meningkat dari 37 tahun, selama 1925-30, menjadi 52 tahun selama 1955-60. Peningkatan tingkat pertumbuhan populasi memperburuk tekanan pada sumber daya lahan. Proses stabilisasi populasi dimulai pada awal 1960-an. Menanggapi tekanan populasi yang tinggi

ditambah dengan kemiskinan yang ekstrim, pemerintah menjadi lebih terlibat dalam keluarga berencana. Fertilitas mulai menurun dengan cepat pada pertengahan 1960-an dan mencapai tingkat penggantian populasi pada pertengahan 1980-an. Fertilitas terus menurun sehingga tingkat kesuburan tahun 2000 harus mengarah pada pengurangan populasi 30% dalam 30 tahun. (Hwan, 2019)

Proses transisi kesuburan sangat terkait dengan pembangunan ekonomi dan urbanisasi, yang dianggap sebagai kekuatan utama dalam perubahan tingkat kesuburan. Tetapi, dalam kasus Korea, transformasi sosial setelah tahun 1960 bersifat holistik. Faktor-faktor ini saling terkait dan membentuk tiga dimensi utama transformasi. Sering juga diperdebatkan bahwa nilai-nilai dan sistem tradisional merugikan transisi kesuburan serta perkembangan ekonomi, tetapi pengalaman Korea tidak mendukung argumen ini. Sistem keluarga tradisional — khususnya sistem preferensi institusional anak-anak dalam hal gender dan urutan kelahiran dalam keluarga — diketahui memainkan peran penting dalam penyebaran ideal keluarga satu atau dua anak. Misalnya, putra pertama paling dihargai dan dapat memenuhi semua kebutuhan fungsional keluarga sesuai dengan sistem keluarga tradisional. Ini dapat ditafsirkan untuk mendukung cita-cita satu anak laki-laki atau satu anak jika risiko kematian anak minimal. Ciri-ciri

budaya lain — seperti kewajiban orang tua untuk mendukung anak-anak demi kesuksesan duniawi mereka, dan keterlibatan otoriter kepemimpinan negara dalam keluarga berencana — dianggap sebagai faktor penting dalam pengurangan kesuburan yang cepat. (Gietel, 2018)

Dengan adanya transisi kesuburan, angka kematian di Korea Selatan ikut menurun. Harapan hidup saat lahir diperkirakan 52,4 tahun pada 1960 dan mencapai 75,5 tahun pada 1999. Penuaan populasi adalah akibat langsung dari tren demografis ini. Proporsi populasi berusia 65 dan lebih tua adalah 2,9% pada tahun 1960, dan meningkat menjadi 5,1% pada tahun 1990, dan menjadi 7,2% pada tahun 2000. Penurunan kesuburan juga membawa pengurangan signifikan dalam ukuran keluarga. Ukuran rumah tangga rata-rata menurun dari 5,5 menjadi 3,3 orang antara tahun 1960 dan 1995. (Hwan, 2019)

2. Pembangunan Ekonomi (*Economic Development*)

Perubahan besar dalam hal ekonomi telah diperhatikan dalam setiap bidang kehidupan sejak tahun 1960. Pada tahun 1962, pemerintah memulai serangkaian rencana nasional 5 tahun untuk pembangunan ekonomi, dan ekonomi nasional mulai tumbuh dengan cepat. GNP per kapita naik dari sekitar 80 dolar pada 1960 menjadi 1.600 dolar pada 1980, dan melampaui angka 10.000 dolar pada pertengahan 1990-an,

sebelum negara itu menghadapi krisis keuangan internasional pada akhir 1997. GNP per kapita turun menjadi 6.740 dolar pada tahun 1998, tetapi pulih ke angka 10.000 dolar pada tahun 2000, dan pemerintah menyatakan bahwa krisis keuangan telah berakhir pada tahun 2001. Perubahan yang bersamaan dalam kehidupan material telah terlihat. Misalnya, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar meningkat 360 kali lipat, dari 31.000 menjadi 11.134.000, antara tahun 1960 dan 1999, sementara populasinya kurang dari dua kali lipat pada periode yang sama. (Hwan, 2019)

Mekanisme utama untuk pembangunan ekonomi adalah industrialisasi yang dipimpin pemerintah. Menyadari fakta bahwa Korea adalah negara dengan sumber daya alam yang langka dan tenaga kerja terdidik yang berlimpah, dipimpin oleh Presiden Park Jung-hee, Korea Selatan berusaha untuk mengejar industrialisasi yang padat karya dan berorientasi ekspor. Untuk ini, pemerintah mengizinkan eksploitasi tenaga kerja dengan melarang serikat pekerja, mendorong produksi barang-barang konsumen, dan membangun infrastruktur, seperti jalan raya. Meskipun ditentang keras, Presiden Park Jung Hee mendikte kebijakan industri untuk mengembangkan secara strategis industri berat dan kimia pada akhir 1960-an. Jenis kepemimpinan otoriter ini sering diakui sebagai faktor pendorong utama dalam pembangunan ekonomi Korea. Presiden Park tidak hanya

memadamkan suara oposisi, dia juga berhasil memobilisasi dukungan publik untuk kampanye tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak studi banding tentang pembangunan Asia Timur menyatakan tradisi Konfusianisme sebagai salah satu elemen kunci dalam keajaiban ekonomi. Ini mencakup birokrasi otoriter yang terpusat, penekanan pada kesuksesan duniawi, penilaian pembelajaran yang tinggi, dan prinsip universal dalam merekrut pejabat pemerintah. Elemen-elemen budaya ini masih berlaku di masyarakat Korea dan membimbing perilaku orang Korea. (Hwan, 2019) (Tudor, 2012)

Dorongan ekonomi yang diprakarsai negara berkontribusi pada pembentukan kelompok-kelompok Chaebol, atau konglomerat bisnis, meskipun peran mereka dalam pembangunan ekonomi sangat diperdebatkan. Chaebol memainkan peran penting dalam membangun industri berat seperti pembuatan mobil dan pembangunan kapal, dalam promosi ekspor, dan dalam penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, manajemen ekspansionis, nepotistik, dan monopolistik mereka membungkam manajer profesional, pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah, dan distribusi kekayaan yang merata. (Hwan, 2019)

Kontribusi sosial penting lainnya dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan kelas menengah yang merupakan tulang punggung demokrasi. Kelas menengah mewakili sekitar

21% dari populasi pada tahun 1960 dan meningkat menjadi 46% pada tahun 1990. Meskipun berhasil secara ekonomi, partisipasi politik rakyat telah sangat ditekan hingga tahun 1987, ketika sebuah proses demokratisasi, yang dilambangkan oleh perubahan konstitusi untuk memilih Presiden melalui pemungutan suara rakyat, menandai berakhirnya kekuasaan 26 tahun kediktatoran militer. Protes mahasiswa yang keras terhadap kediktatoran merupakan kekuatan pendorong utama dalam demokratisasi Korea. Akan tetapi, secara luas diakui bahwa pertumbuhan kelas menengah adalah faktor kondisional yang paling vital dalam perjuangan untuk demokrasi. (Hwan, 2019)

Masalah yang lama ditekan muncul dengan demokratisasi, termasuk masalah lingkungan, masalah hak asasi manusia, masalah yang terkait dengan tenaga kerja, dan masalah kesejahteraan. Organisasi sipil dan gerakan sosial berkembang di sekitar isu-isu lingkungan, perempuan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, Koalisi Gerakan Anti-polusi (kemudian Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan) dibentuk pada tahun 1988, Koalisi Warga Negara untuk Keadilan Ekonomi didirikan pada tahun 1989, dan Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif memulai kegiatan pada tahun 1994. Selain itu, konflik sosial diintensifkan dengan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial. Perpecahan telah tumbuh di antara generasi

dalam pola perilaku dan pemikiran, jarak antara kaya dan miskin telah melebar, ketegangan antara kelompok-kelompok dari latar belakang regional yang berbeda telah meningkat, dan hubungan bisnis-buruh sedikit meningkat. Orang Korea saat ini cenderung menggambarkan masyarakat mereka sebagai orang yang penuh masalah dan konflik. (Hwan, 2019)

3. Urbanisasi (*Urbanization*)

Semenanjung Korea terletak 33–43 derajat lintang utara dan 124–132 derajat bujur timur. Titik paling timurnya, di 131 ° 52 longitude bujur timur, adalah pulau Dokdo, secara administratif merupakan bagian dari wilayah Ulleung-gun di provinsi Gyeongsangbuk-do di Korea Selatan; titik paling baratnya, pada 124 ° 11 longitude bujur timur, adalah pulau Maando, yang termasuk dalam wilayah administratif Sindo-eup di dalam Sindo-gun di provinsi Pyeonganbuk-do di Korea Utara. Terletak di 33 ° 06 latitude garis lintang utara, titik paling selatan Korea adalah pulau Marado, bagian dari Daejeong-eup di dalam kota Seogwipo di Pulau Jeju, yang secara resmi menjadi Pemerintahan Khusus Jeju. Propinsi. Titik paling utara Semenanjung Korea adalah Pungseo-ri, Yupo-myeon, di daerah Onseong-gun di provinsi Hamgyeongbuk-do, Korea Utara, yang berada pada 43 ° 00 latitude garis lintang utara. Semenanjung Korea telah lama berfungsi sebagai saluran penghubung antara orang-orang

Jepang dengan seluruh benua Asia. Akibatnya, orang Korea sejak awal telah menerima pengaruh budaya dan material dari daratan Cina dan telah memainkan peran menjembatani dengan meneruskan pengaruh ini ke Jepang. (Sangcheol, 2016)

Pada 1960-an, perpindahan besar-besaran petani ke wilayah kota disebabkan oleh kemiskinan di daerah pedesaan, dan proporsi populasi perkotaan meningkat dari 28% menjadi 41% antara tahun 1960 dan 1970. Tujuan utama para migran ini adalah Seoul. Dari tahun 1960 hingga 1965, sekitar 5% dari populasi pedesaan pergi ke wilayah kota, 70% di antaranya menuju Seoul; dari tahun 1965 hingga 1970, 13,6% berangkat ke wilayah kota, 61% di antaranya pergi ke Seoul. Akibatnya, pada tahun 1970 Seoul adalah kota migran, di mana mereka yang telah tiba selama dekade terakhir terdiri sekitar 50% dari populasi. Juga diperhatikan bahwa kota-kota besar lainnya seperti Busan dan kota-kota industri yang baru dipasang seperti Ulsan menunjukkan peningkatan populasi yang besar melalui migrasi. Proporsi penduduk perkotaan terus meningkat, melewati tingkat 50% pada akhir 1970-an, dan mencapai 80% pada 2000. Migrasi desa-ke-kota merupakan komponen utama urbanisasi yang cepat ini pada tahap sebelumnya, tetapi kontribusinya telah berkurang. tajam dengan ukuran populasi pedesaan yang menyusut. Sebaliknya, perluasan kota dan pemasangan kota-

kota baru di daerah pedesaan menyumbang sebagian besar pertumbuhan populasi perkotaan sejak tahun 1980. Selain itu, industrialisasi dan modernisasi mengambil peran yang semakin penting dalam migrasi dan urbanisasi dalam beberapa tahun terakhir. (Hwan, 2019)

Kecenderungan populasi untuk berkonsentrasi di Seoul telah sangat berkurang sejak tahun 1970, dan pada tahun 1990-an populasi yang diperoleh melalui migrasi hampir berhenti di wilayah metropolitan. Hal tersebut bukan terjadi karena desentralisasi, melainkan karena ekspansi spasial dari pemerintahan fungsional Seoul ke daerah-daerah terdekat dan kota-kota satelit, suatu proses yang akhirnya membentuk Seoul Besar, atau Seoul megalopolis, yang terdiri dari Kota Seoul, Inchon, dan kota-kota di Provinsi Kyounggi yang berdekatan. Bagian migran Seoul yang lebih besar telah lebih dari 50% sejak tahun 1955 (kecuali selama 1975-80). Kecenderungan konsentrasi ini telah melemah selama tahun 1955-80, tetapi telah semakin menguat sejak tahun 1980. Dilaporkan bahwa sekitar 80% migran desa-ke-kota pindah ke Seoul Besar dan lebih dari 40% penduduk Korea saat ini tinggal di daerah ini. Konsentrasi populasi di 'distrik ibukota luas' yang disebut ini menimbulkan masalah serius bagi ekonomi nasional, lingkungan, transportasi, dan pembangunan. (Hwan, 2019)

4. Korea Utara (North Korea)

Sejak pembagian Korea pada tahun 1945, Korea Selatan dan Korea Utara saling bermusuhan dan memiliki jalur yang berbeda di setiap bidang kehidupan. Populasi Korea Utara diperkirakan mencapai 9.307.000 pada saat pembebasan. Korea Utara hampir tidak memiliki peningkatan populasi melalui migrasi lintas perbatasan selama 1945-49, dan kemudian kehilangan lebih dari satu juta orang selama perang saudara 1950-53, karena korban yang banyak dan migrasi pengungsi yang besar ke Korea Selatan. Populasi pada saat itu adalah 8.491.000 pada tahun 1953 dan 14.619.000 pada tahun 1970, mewujudkan pertumbuhan cepat sekitar 3% per tahun. Laju pertumbuhan populasi berkurang tajam pada 1970-an karena penurunan kesuburan. Dengan kata lain, transisi kesuburan dimulai pada awal 1970-an. Korea Utara menyebarkan kontrasepsi pada tahun 1970-an, tetapi kemudian melarangnya. Namun demikian, tren penurunan kesuburan tidak dapat dikendalikan dan tampaknya telah turun di bawah tingkat penggantian pada pertengahan 1980-an, seperti halnya di Korea Selatan. Kekuatan pendorong utama untuk transisi kesuburan adalah kondisi kehidupan keluarga yang buruk. Dikatakan saat ini bahwa kaum muda menghindari pernikahan dan pasangan muda menolak untuk memiliki anak kedua sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan dan

kelaparan yang disebabkan oleh jatuhnya ekonomi nasional. Pemerintah Korea Utara telah melarang distribusi alat kontrasepsi dan mendorong kelahiran, tetapi berbagai bukti menunjukkan bahwa kesuburan telah jatuh jauh di bawah tingkat penggantian. (Adriaan, 2011)

Mengenai situasi ekonomi Korea Utara, ada sedikit konsensus pendapat di antara para peneliti dan analis. Akan tetapi, tidak diragukan bahwa negara tersebut mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup besar selama tahun 1955-75, dan ekonomi sosialis memasuki periode stagnasi yang panjang pada akhir tahun 1970-an. GNP per kapita diperkirakan berada di kisaran 140-460 dolar pada tahun 1960 dan meningkat menjadi 415-1000 dolar pada tahun 1975. Setelah mencapai 760-1100 dolar pada 1980, ekonomi mengungkapkan pertumbuhan yang sangat lambat hingga 1990, diikuti oleh kerusakan cepat pada 1990-an. Situasi pangan diketahui telah memburuk sejak awal 1980-an. Kekurangan makanan diketahui telah menyebabkan malnutrisi secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh penyusutan tinggi dan berat anak sejak tahun 1980. Mempertimbangkan situasi ekonomi, kematian diyakini telah menurun sedikit pada tahun 1980-an dan kemudian meningkat secara substansial pada 1990-an, khususnya selama 1996-98, ketika serangkaian bencana kelaparan melanda negara tersebut. Berbeda dengan angka resmi yang diberikan oleh Korea Utara, yang

menunjukkan tingkat kematian yang sama dengan Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan memproyeksikan harapan hidup Korea Utara saat lahir adalah 61,3 tahun pada tahun 1960, 66,4 tahun pada tahun 1990, dan 65,2 tahun pada tahun 2000 dan pengurangan populasi di paruh akhir 1990-an. (Hwan, 2019)

5. Peran Perempuan (*Women's Role*)

Dalam masyarakat tradisional Korea, peran perempuan terbatas pada rumah. Sejak usia muda, wanita diajari sifat-sifat subordinasi dan ketekunan untuk mempersiapkan peran masa depan mereka sebagai istri dan ibu. Perempuan, secara umum, tidak dapat berpartisipasi dalam masyarakat seperti halnya laki-laki, dan peran mereka terbatas pada urusan rumah tangga. ((KOIS), 2020)

Situasi mulai berubah dengan pembukaan negara ke dunia luar selama akhir abad ke-19. Selama periode ini sekolah modern diperkenalkan, kebanyakan oleh misionaris Kristen Barat. Beberapa sekolah ini didirikan dengan tujuan khusus untuk mendidik perempuan. Wanita-wanita berpendidikan ini mulai terlibat dalam seni, pengajaran, pekerjaan keagamaan, dan mencerahkan wanita lain. Perempuan juga mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan melawan pendudukan Jepang, dan menunjukkan semangat, tekad, dan keberanian yang tidak kalah dari laki-laki. ((KOIS), 2020)

Dengan berdirinya Republik Korea pada tahun 1948, perempuan mencapai hak konstitusional atas kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Tidak ada keraguan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi cepat yang dicapai Korea selama tiga dekade terakhir. Semakin banyak perempuan yang bekerja di bidang profesional. ((KOIS), 2020)

Seiring perkembangan ekonomi berjalan dan kondisi kehidupan orang Korea membaik, tingkat pencapaian pendidikan wanita juga meningkat. Pada tahun 1966, di antara mereka yang lulus sekolah dasar, hanya 33 persen anak perempuan yang melanjutkan pendidikan di sekolah menengah. Angka yang sebanding untuk sekolah menengah dan universitas masing-masing adalah 20 persen dan 4 persen, pada periode yang sama. Namun, pada tahun 1998, rasio yang sebanding mencapai 99,5 persen dan 61,6 persen untuk sekolah menengah dan universitas. Tingkat partisipasi ekonomi perempuan juga telah meningkat secara stabil sejak industrialisasi dari 34,4 persen pada tahun 1965 menjadi 48,1 persen pada tahun 1999. ((KOIS), 2020)

Dalam hal karakteristik angkatan kerja perempuan, pada tahun 1975, hanya 2 persen dari angkatan kerja perempuan yang bekerja dalam pekerjaan profesional atau manajerial,

sementara 4 persen bekerja di posisi klerikal. Namun, pada tahun 1998, 12,6 persen karyawan wanita melayani dalam posisi profesional atau manajerial, dan 16 persen lainnya bekerja di pekerjaan rohani. ((KOIS), 2020)

Dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki pekerjaan profesional, pemerintah mengeluarkan "Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Setara" pada tahun 1987 untuk mencegah praktik-praktik diskriminatif terhadap pekerja perempuan terkait dengan peluang perekrutan dan promosi. Wanita Korea saat ini secara aktif terlibat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kedokteran, teknik, beasiswa, seni, hukum, sastra, dan olahraga. Dengan demikian, wanita memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. (Rahm, 2019)

B. Sebab dan Akibat Krisis Demografi di Korea Selatan

Ketika suatu negara mengalami perubahan ekonomi, efek transisi bukan hanya mempengaruhi bidang finansial namun juga memiliki efek yang besar pada bidang populasi. Hal tersebutlah yang terjadi di Korea Selatan dimana selama tiga generasi terakhir, Korea Selatan telah mengalami perubahan ekonomi karena industrialisasi. Perubahan ekonomi Korea Selatan akhirnya juga mengubah populasinya,

dengan sangat cepat, Korea Selatan mengalami paradoks populasi. Paradoks populasi yang dialami oleh Korea Selatan ialah kurangnya populasi penduduk atau krisis demografi. (Quick, 2019)

Penyebab krisis demografi yang pertama ialah, Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia. Rata-rata wanita Korea Selatan hanya memiliki 1,1 anak, lebih rendah dari negara lain. (Sebaliknya, rata-rata global adalah sekitar 2,5 anak.) Angka ini telah menurun dengan cepat: antara awal 1950-an dan hari ini, tingkat kesuburan di Korea Selatan turun dari 5,6 menjadi 1,1 anak per wanita. Perempuan di Korea Selatan makin menunda pernikahan untuk lebih mementingkan karir dan pendidikan yang lebih tinggi. Data terakhir menyatakan bahwa lebih dari 30% dari perempuan yang melahirkan pada tahun 2018 berumur 35 tahun keatas. (Quick, 2019)

Bagaimana hal tersebut memengaruhi populasi masa depan negara? Ini sebenarnya adalah paradoks populasi untuk masyarakat yang cepat menua. Faktor kunci dalam stabilisasi populasi adalah 'tingkat penggantian': titik di mana jumlah total anak yang lahir per wanita dalam suatu populasi secara tepat menyeimbangkan jumlah kematian generasi tua. Angka yang sesuai untuk stabilisasi populasi ini adalah 2.1 - yang berarti bahwa tingkat kesuburan di Korea Selatan tidak mencapai tingkat penggantian. Dengan kata lain, wanita tidak

memiliki cukup anak di Korea Selatan untuk menstabilkan populasinya. (Matsuda, 2020)

Para ahli menyatakan penyebab rendahnya angka kesuburan di Korea Selatan adalah tingginya pengeluaran dalam hal pemeliharaan anak, tingginya angka pengangguran bagi anak muda dan beban berat bagi ibu yang bekerja dan masih harus menanggung pekerjaan rumah tangga. Pendidikan dan pekerjaan yang sangat kompetitif juga menjadi faktor dibalik rendahnya tingkat kesuburan. *“This [Korean] society is just way too competitive. I don’t think it’s right for any child to go through this system,”* seorang perempuan Korea berusia 34 tahun kepada the *Agence France-Presse*. (Fensom, 2019)

Sekitar 56 persen perempuan berumur 15-64 bekerja di Korea Selatan, dibawah rata-rata OECD yang hampir berada diangka 60 persen, dan 72-75 persen di Denmark dan Swedia, dimana tingkat kelahirannya merupakan salah satu yang tertinggi dinegara maju. Perekrut pekerjaan menyatakan bahwa perempuan muda yang sudah menikah memiliki kesempatan lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya diskriminasi. Pada November, Mahkamah Agung memberi hukuman selama 4 tahun kepada mantan CEO Pengadilan Keamanan Gas Korea yang dikelola negara (*state-run Korea Gas Safety Corp*) karena memanipulasi nilai interview calon pekerja untuk menolak adanya pendaftar perempuan dari proses perekrutan. Selain itu, tak

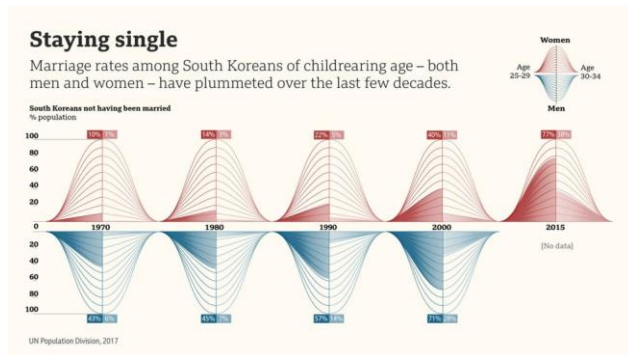
satu pun dari sembilan anggota dewan di Hyundai Motor Co (005380.KS) adalah wanita. (Fensom, 2019)

“The whole period of before, during and after childbirth weighs on our career,” kata asisten manager perempuan di Hyundai Motor. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan semakin kesulitan, tambahnya.

Kesenjangan upah gender di Korea Selatan adalah yang tertinggi diantara negara maju pada 34.6 persen, diatas rata-rata OECD yaitu 13.8 persen. (Roh J. , 2019) Dengan tingginya kesenjangan upah gender di OECD, perempuan di Korea Selatan sulit untuk menempati jabatan tinggi dalam karir dan harus keluar dari pekerjaan karena pernikahan, kelahiran anak dan mengasuh anak. (Fensom, 2019)

Penyebab krisis demografi di Korea Selatan yang kedua ialah karena fenomena *Single in Sampo Generation*.

Grafik 2.1 Rasio Fenomena Single in Sampo Generation



Sumber: Valentina d'Efilippo

Wanita Korea Selatan tidak hanya memilih untuk memiliki anak lebih sedikit - beberapa memilih untuk melepaskan hubungan romantis sepenuhnya. Semakin banyak yang memilih untuk tidak menikah sama sekali, dan bahkan hubungan kasual. Pergeseran ini merupakan bagian dari fenomena sosial yang meningkat di Korea Selatan: Generasi Sampo. Kata 'sampo' berarti menyerahkan tiga hal: hubungan, perkawinan dan anak-anak. (Quick, 2019)

Statistik mencerminkan perubahan dramatis dalam budaya: tingkat perkawinan di antara orang Korea Selatan pada usia subur - baik pria maupun wanita - telah anjlok selama empat atau lima dekade terakhir. Dalam sensus 2015, kurang dari seperempat (23%) wanita Korea Selatan berusia 25 hingga 29 tahun mengatakan

mereka menikah, turun tajam dari 90% pada tahun 1970. (Quick, 2019)

Ada juga kecenderungan yang meningkat di antara pria dan wanita untuk menunda atau menghindari pernikahan di kedua negara. Pada 2018, mayoritas warga Korea Selatan berusia 20 hingga 44 tahun masih lajang, menurut Institut Kesehatan dan Sosial Korea (KIHSA). Di antara mereka yang tidak berkencan, 51% pria dan 64% wanita mengatakan mereka memilih untuk tetap melajang. (Quick, 2019)

Banyak dari anak muda Korea Selatan ini mengatakan mereka tidak punya waktu, uang, atau kapasitas emosional untuk berkencan. Mereka bersaing dengan meningkatnya tingkat pengangguran di pasar kerja yang sangat kompetitif - yang berarti banyak menghabiskan waktu luang mereka di sekolah dan untuk mendapatkan sertifikat tambahan atau keterampilan profesional. (Kwon J. , 2019)

Beberapa kelas perguruan tinggi dan pendidik berusaha mengajarkan siswa tentang kencan, cinta dan seks dalam upaya untuk membalikkan budaya terhadap kencan - bahkan menugaskan siswa untuk berkencan. (Kwon J. , 2019)

Akibat yang dihadapi oleh Korea Selatan karena krisis tersebut ditunjukkan oleh data demografis negara yang menunjukkan bahwa Korea Selatan berada di ambang era penurunan populasi. Menurut Kementerian Dalam Negeri

dan Keselamatan, populasi negara ini turun 1.566 menjadi 51.849 juta pada Desember, dibandingkan dengan angka bulan sebelumnya 51.851 juta. (Se, 2020)

Diagram 2.1 Pertumbuhan Populasi di Korea Selatan

Population growth of South Korea

(In 2019, month-on-month)



Sumber: Kim Sun-young/The Korea Herald

Ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun sejak April 2009 (ketika diposting minus 2.716) bahwa angka bulanan turun. Sementara penurunan pada bulan April 2009 adalah kejadian sporadis, angka pada bulan Desember 2019 menandakan penurunan terus

menerus di tahun-tahun dan dekade mendatang. (Se, 2020)

Perkiraan di antara beberapa analisis tentang penurunan bertahap di masa mendatang datang dari fakta bahwa populasi pria telah menurun untuk pertama kalinya dalam sejarah pada tahun 2019 secara tahunan sejak pemerintah mulai mengumpulkan data. Jumlah populasi pria turun 1.313 pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara khusus, angka bulanan turun untuk bulan kelima berturut-turut - minus 261 pada bulan Agustus, minus 354 pada bulan September, minus 844 pada bulan Oktober, minus 575 pada bulan November dan minus 1.788 pada bulan Desember. (Se, 2020)

Meskipun peningkatan terus-menerus dalam populasi wanita terus mengimbangi angka pria, jumlah wanita juga miring ke arah perlambatan pertumbuhan secara bulanan - 2.069 pada September, 2.296 pada Oktober, 2.296 pada Oktober, 1.297 pada November dan hanya 222 pada Desember. Populasi perempuan belum memposting angka minus bahkan ketika pertumbuhan negatif untuk seluruh populasi dilaporkan dua kali sebelumnya - pada bulan April 2009 dan pada bulan Maret 2008 - selama dekade terakhir. Kedua kasus tersebut dipimpin oleh penurunan jumlah pria. (Se, 2020)

Data tersebut diambil dari tujuh kota besar - Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju dan Ulsan - jumlah penduduk laki-laki

turun di semua kota pada bulan Desember, dan populasi perempuan turun di enam wilayah kecuali Incheon. (Se, 2020)

Daegu merupakan wilayah yang mempunyai angka yang dihitung minus 3.550 (minus 2.032 untuk pria dan minus 1.518 untuk wanita), diikuti oleh Seoul dengan minus 3.470 (minus 2.577 dan minus 893), Busan dengan minus 2.880 (minus 1.748 dan minus 1.132), Gwangju dengan minus 2.447 (minus 1.428 dan minus 1.019) dan Daejeon dengan minus 2.085 (minus 1.000 dan minus 1.085). (Se, 2020)

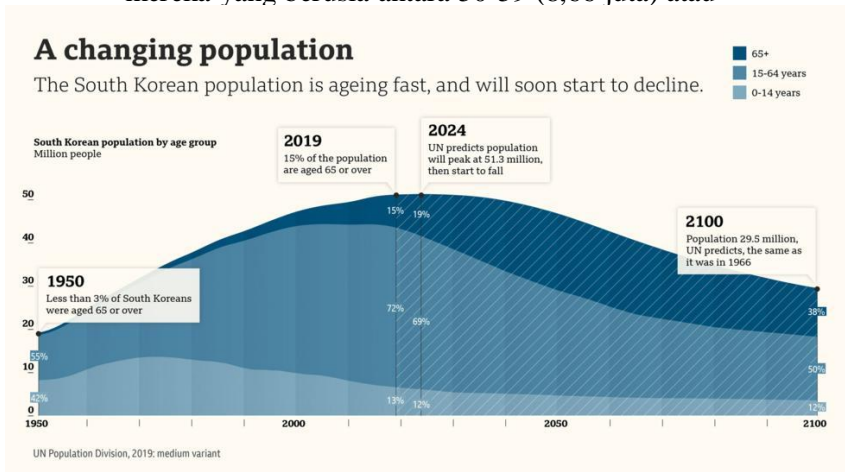
Penurunan besar di Seoul dan enam kota metropolitan lainnya disebabkan oleh beberapa warga yang berbondong-bondong pergi ke perumahan baru di Provinsi Gyeonggi dan Sejong, sebuah kota berorientasi administrasi yang dikembangkan pada tahun 2012. Gyeonggi (penduduk nomor satu di negara ini) dan Sejong melihat jumlah penduduk terdaftar naik 11.489 (5.424 untuk pria 6.065 untuk wanita) dan 1.928 (929 dan 999), masing-masing, bulan lalu. (Se, 2020)

Meskipun demikian, gejala-gejala penurunan nasional yang melibatkan wilayah provinsi telah muncul karena tingkat perkawinan yang terus menurun dan tingkat kesuburan terendah di dunia. Data Kementerian menunjukkan bahwa jumlah persalinan bertahan di 24.254 (12.422 anak laki-laki dan 11.832 anak perempuan) pada bulan Desember, dibandingkan

dengan 37.028 (18.986 dan 18.042) lima tahun sebelumnya pada tahun 2014. (Se, 2020)

Jumlah orang berusia 65 atau lebih, yang disebut senior, di Korea melampaui angka 8 juta untuk pertama kalinya mencapai 8,02 juta pada bulan lalu, yang mengambil 15,5 persen dari populasi. Korea Selatan, yang digolongkan sebagai masyarakat lanjut usia pada tahun 2000, di mana proporsi manula mencapai 7 persen, dan diklasifikasikan sebagai masyarakat lanjut usia pada tahun 2017 dengan persentase mereka mencapai 14 persen. (Se, 2020)

Usia rata-rata orang Korea telah mencapai 42,6 (41,5 untuk pria dan 43,8 untuk wanita). Ini lebih tua dari 40 (38,9 dan 41,2) pada Desember 2014 dan 37,5 (36,4 dan 38,7) pada Desember 2009. Bulan lalu, jumlah orang berusia di bawah 9 (4,16 juta) kurang dari setengah dari mereka yang berusia antara 50-59 (8,66 juta) atau



Sumber: The Korean Herald

Pada tahun 1950, kurang dari 3% populasi berusia 65 tahun ke atas. Pada tahun 2019, angka tersebut menjadi 15%. Pada pertengahan 2060-an, PBB memperkirakan persentase mereka yang lebih tua dari 65-an akan memuncak pada lebih dari 40%. Angka-angka tersebut melukiskan gambaran masyarakat yang sangat tua. Dengan tingkat kelahiran yang rendah, perkawinan yang lebih sedikit dan umur yang lebih panjang, tren tersebut bergabung untuk menciptakan populasi Korea Selatan yang sebenarnya lebih cepat menua daripada negara maju lainnya. (Quick, 2019)

Populasi dengan umur yang lebih panjang berarti ada lebih banyak orang yang lebih tua, dan wanita memiliki lebih sedikit anak berarti tidak ada cukup banyak orang muda untuk menggantikan mereka ketika mereka mati. Akhirnya, paradoks ini berarti bahwa populasi Korea Selatan akan mulai menurun. PBB memperkirakan populasi Korea Selatan akan mencapai puncaknya pada sekitar 2024, dan kemudian mulai turun. Pada tahun 2100, PBB memperkirakan populasi Korea Selatan hanya sekitar 29 juta - sama seperti tahun 1966. (Quick, 2019)

Krisis demografi tersebut akhirnya mampu menciptakan krisis perekonomian bagi

Korea Selatan pada masa mendatang. Masyarakat lanjut usia di Korea Selatan mampu menyeret pertumbuhan investasi dan produktivitas, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan PDB. Penuaan populasi cenderung membuat negara kurang produktif. Banyak orang tua yang pensiun, yang berarti mereka tidak lagi berkontribusi banyak pada produksi ekonomi, dapat memperlambat pertumbuhan output per kapita. Dan ketika rasio pensiunan terhadap pekerja tumbuh, setiap pekerja harus menghabiskan lebih banyak uang, waktu dan upaya untuk mendukung pasukan lansia yang semakin bertambah. (Quick, 2019)

Populasi yang jatuh juga dapat mempengaruhi seberapa banyak perusahaan ingin berinvestasi di suatu negara. Perusahaan ingin menghasilkan barang dan jasa di dekat tempat tinggal pelanggan mereka, sehingga ketika ukuran absolut dari pasar nasional mulai menyusut, itu mengurangi insentif untuk membangun kantor dan pabrik baru di Korea Selatan. (Quick, 2019)

Populasi yang menua juga dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Setelah pekerja melewati usia 40-an, produktivitas mereka mulai menurun - mungkin karena mereka lebih lambat beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Sebuah makalah 2016 oleh para ekonom di Dana Moneter Internasional menyarankan bahwa penuaan dapat menjadi

alasan untuk penurunan produktivitas di Eropa. Makalah lain baru-baru ini, oleh ekonom Nicole Maestas, Kathleen Mullen dan David Powell, menemukan bahwa negara bagian A.S. dengan populasi yang lebih tua mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dalam PDB per kapita. Ekonom di Moody's Analytics menemukan hasil yang serupa. (Smith, 2019)

Bagi pemerintah, lebih sedikit pekerja yang mendukung populasi lansia yang bertambah akan meningkatkan pengeluaran kesejahteraan sosial. Hyundai Research Institute Korea Selatan melihat tingkat pertumbuhan potensial negara turun dari 2,7 persen ke level terendah 1 persen "segera setelah 2030," analisis senior Hong Joon-pyo mengatakan kepada Nikkei Jepang. Moody's Investors Service telah memperingatkan bahwa peringkat kredit Korea Selatan dapat berada di bawah tekanan negatif karena kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, utang pemerintah yang lebih tinggi, dan keterjangkauan hutang yang lebih rendah di tengah melambatnya ekspansi dan penuaan tenaga kerja mereka khususnya pada 2030-an. Keterjangkauan hutang yang lebih lemah akan terwujud pada tahun 2030-an karena beban utangnya meningkat lebih tajam, membebani kekuatan fiskal pemerintah. (Smith, 2019)

Selain itu di Korea Selatan, warga negara yang berbadan sehat yang berusia antara 18 dan 40 tahun diharuskan untuk bertugas di militer

selama hampir dua tahun. Dengan krisis populasi yang meningkat dan secara teknis perang yang sedang berlangsung dengan Korea Utara, Korea Selatan mungkin mulai memaksa lebih banyak tentara asing dan warga negara Korea di luar negeri untuk mengikuti wajib militer. Institut Analisis Pertahanan Korea yang dikelola pemerintah saat ini sedang menyelesaikan penelitian seputar gagasan penyusunan warga yang dinaturalisasi - mereka yang memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan, tetapi tidak tinggal di Korea Selatan- untuk mengatasi jumlah pasukan yang berkurang di negara itu. (Smith, 2019)

“Kami menghadapi krisis populasi, dan kami berusaha mencari tahu bagaimana kami dapat meningkatkan jumlah tentara di negara kami,” kata Andrew Eungi Kim, seorang profesor studi internasional di Korea University.

Tahun lalu, Korea Selatan memiliki sekitar 599.000 tentara di pasukan bersenjata, tetapi pasukan laki-laki berbadan sehat diperkirakan akan berkurang separuh dalam dekade berikutnya. Di bawah undang-undang saat ini, jumlah warga negara Korea Selatan yang memenuhi syarat untuk wajib militer diperkirakan akan turun menjadi hanya 225.000 pada tahun 2025 - dan kemudian 161.000 pada tahun 2038. (Smith, 2019)

Sebagian masalahnya adalah bahwa Korea Selatan saat ini memiliki salah satu tingkat

kesuburan terendah di dunia, sementara prospek pekerjaan yang buruk di negara itu mendorong banyak anak muda Korea Selatan ke luar negeri. Sementara itu, ribuan warga negara laki-laki dengan kewarganegaraan ganda menyerahkan kewarganegaraan Korea Selatan mereka setiap tahun untuk menghindari wajib militer, yang terkenal karena kondisi yang keras, termasuk perpeloncoan dan meningkatnya angka bunuh diri. (Smith, 2019)